

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Yasa Abubakar, 2009. *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam.
- Andi Rahman, 2022, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Bambang Sunggono, 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2018. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Dedi Hidayat, 2023, *Manajemen Penanganan Anak Jalanan Pendekatan Kolaboratif antara Pemerintah dan Masyarakat*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Edi Suharto, 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Fajar Surya, 2020, *Penegakan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Kencana
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019. *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, Unimal Press.
- Hamidi, 2004. *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Malang, UMM Press.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rina Wulandari, 2021, *Anak Jalanan dan Tantangan Penegakan Hukum di Wilayah Perkotaan*, Bandung, Refika Aditama
- Siti Nurhayati, 2024, *Kebijakan Publik dan Ketertiban Sosial Studi tentang Peran Satpol PP*, Surabaya, Airlangga University Press
- Syamsir, Torang, 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung, Alfabeta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Penanganan Anak Jalanan

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe

C. Jurnal dan Skripsi

Akbar, A. A. 2020. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda." *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(3).

Atikah Adelia Sayyidah. 2024. "Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara." Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Cunduk Wasiati. 2020. "Partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Dedy Suhendi, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum," *Jurnal Tatapamong*, Vol. 1 No. 1, Maret 2019

Difky Maulana. 2025. "Analisis Program Tapera Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Fatma Afifah, dan Sri Warjiyati. 2024. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2.

Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, Vol. 11, No. 1.

- H. Dedi Djubaedi, H. Ahmad Asmuni, dan Eti Nurhayati, eds. 2023. *Internalisasi Nilai Pendidikan Islam pada Anak Terlantar*. Penerbit P4I, Medan.
- Haekal Amalin Firdany Putra, Jeremy Arnold Christian Bangun, Firwanda Sandi Pradipta, and Elsi Kartika Sari. 2025. "Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Hairan. 2024. "Aspek Hukum Dan Rasio Kebutuhan Jumlah Satpol PP Sebagai PPNS Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kabupaten Kutai Kartanegara)." *Jurnal Proceeding APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1.
- Hairani Siregar, Fajar Utama Ritonga, dan Randa Putra Kasea Sinaga. 2023. Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Panti & Non-Panti. Vol. 1. *Jurnal Jejak Pustaka*.
- Ike Rachmawati Yulia, dan Adi Mulyadi. 2019. "Kinerja Satpol PP dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Sukabumi." *Journal of Publik Policy and Administration Silampari*, Vol. 1, No. 1.
- Ismail Nurdin. 2014. "Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung." *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 16, No. 3.
- Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. 2021. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1, No. 2.
- Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati. 2020. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan." *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2.
- Lia Trizza Firgita Adhilia, Wiwin Wiwin, Ardiyanti Aris, Supriadi Jufri, Muh Akbar Fhad Syahril, and Muhammad Yasmin. 2025. "Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1.
- Muh Hasrul. 2017. "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah." *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25, No. 2.
- Muh Ridha Hakim. 2016. "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2.
- Muhammad Muammar Khadafi. 2023. "Efektivitas Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan." Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, dan Windi Rahmawati. 2024. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1.
- Ni Ketut Hevy Yushantini. 2020. "Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 6.
- Noor Rahmad, dan Wildan Hafis. 2020. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Pangestuti. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki. 2001. "Penelitian Hukum." *Jurnal Yuridika*, Vol. 16, No. 1.
- Rachmad Suprayetno. 2017. "Kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 4, No. 4.
- Rahmadhani. 2025. "Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak Dalam Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak Di Bangka Belitung." PhD Disertasi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
- Ronawaty Anasiru. 2011. "Implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di kota Makassar." *Sosiokonsepsia*, Vol. 16, No. 2.
- Sri Mugiant, Sri Winarni, dan Wulandari Dyah Pangestuti. 2018. "Faktor penyebab remaja menjadi anak jalanan." *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 7, No. 1.
- Suyatno. 2023. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1.
- Syahrudin, S., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., dan Rifdan, R. 2021. "Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar." *JISIP Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 4.
- Tareq Jati Pamungkas, dan Achmad Hariri. 2022. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State." *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 4.
- Vita Rachmawati, dan Dodi Faedlulloh. 2021. "Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan." *Journal of Political Issues*, Vol. 2, No. 2.

Yulis Yusriliah. 2023. "Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat." Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.